

Determinan Investasi Asing Langsung OPPO Di Indonesia

(Determinant of OPPO's Foreign Direct Investment in Indonesia)

Muhammad Nana Siktiyana, Djumadi M. Anwar¹

muhammad.nana.2014@fisipol.umy.ac.id

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

Development of information technology and modernization of telecommunication tools have increased a dependence of world society on wireless communication devices. Various innovations contributed to human activities including the cultivation of smartphones. Globalization and the end of cold war gave emergence to new actor in international relations studies, multinational corporations. This business unit is not only engaged in a particular nation-state region, MNCs' activities have crossed state borders in multi aspects. A Chinese technology company, OPPO carried out its products on international market. At the end of 2014, the company decided to invest in Indonesia after a year of entering its smartphone market competition. This study aims to find causes that influence the action taken by the corporation. Firm-specific-advantages theory, internalization theory and institutional approach on foreign direct investments used to explain that phenomenon.

Keyword: Indonesia, FDI, MNCs, OPPO Smartphone

Abstrak

Perkembangan teknologi informatika dan modernisasi alat telekomunikasi telah meningkatkan ketergantungan masyarakat dunia terhadap komunikasi nirkabel. Berbagai inovasi telah membantu kehidupan manusia termasuk penemuan ponsel pintar (*smartphone*). Fenomena globalisasi dan perang dingin yang berakhir memunculkan aktor baru dalam kajian hubungan internasional yaitu perusahaan multinasional (*multinational corporations*). Unit bisnis ini tidak hanya bergerak pada suatu wilayah negara-bangsa tertentu, kegiatan *MNCs* telah melintasi batas wilayah negara asal dalam aspek yang berbeda-beda. Perusahaan teknologi asal China, OPPO turut memasarkan produk buaatannya di pasar internasional. Pada akhir tahun 2014, korporasi memutuskan untuk menanamkan modal di Indonesia setelah setahun memasuki persaingan pasar *smartphone* tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sebab-sebab yang mempengaruhi tindakan yang diambil korporasi. Kerangka pemikiran dalam analisa fenomena itu adalah *firm-specific-advantages theory*, *internalization theory* dan *institutional approach* dalam *foreign direct investments*.

Kata kunci: Indonesia, PMA, *MNCs*, OPPO *smartphone*

¹ Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si. merupakan dosen tetap program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informatika telah mempermudah aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Penemuan pesawat telepon di awal abad ke-20 adalah salah satu terobosan yang sangat berguna bagi kemajuan peradaban modern. Seseorang di suatu wilayah dapat berkomunikasi dengan rekan sejawatnya di bagian dunia lain. Inovasi yang terus digerakkan oleh para peneliti ilmu eksakta membawa telepon ke era baru dengan berbagai fungsi dan mampu melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Peningkatan intensifitas hubungan antar masyarakat dunia memperkuat peranan globalisasi dan ketergantungan. Aktor baru pun muncul dan memberikan pengaruh kepada percaturan politik ekonomi internasional. Negara tidak lagi menjadi sebuah unit analisa yang selalu menjadi perhatian utama ilmuwan hubungan internasional. Perusahaan dan organisasi nirlaba menunjukkan geliat dalam ranah global.

Paska krisis ekonomi global tahun 2008, industri telepon pintar (*smartphone*) global mengalami proses revolusi yang dramatis. Gejolak pasar Amerika Serikat dan Eropa turut mempengaruhi korporasi teknologi besar. Nokia yang pernah mendominasi pasar dunia mulai kehilangan hegemoni produk telepon genggam (*Handphone*). Pengaruh kelesuan di negara-negara barat dimanfaatkan oleh vendor-vendor dari asia yang cenderung masih kuat menghadapi kemunduran ekonomi global. Samsung, produsen alat elektronik dan ponsel genggam asal negeri ginseng berhasil mengambil alih tahta yang ditinggalkan oleh Nokia. Peluncuran sistem operasi (*operating system*) Android oleh Google Inc turut memberikan andil bagi gelombang besar perubahan industri gawai telekomunikasi. Lisensi terbuka yang disematkan pada Android mempermudah siapapun untuk menggunakan, merubah dan mengedarkan perangkat berbasis sistem ini tanpa perlu membayar royalti kepada pembuatnya. Berkat kedua faktor diatas berbagai perusahaan ikut merakit dan memasarkan produk *smartphone* dengan mereknya. Asus, Lenovo dan Sharp merupakan contoh dari perusahaan elektronik yang turut meramaikan persaingan global. Disamping itu, nama-nama *vendor* baru seperti OPPO, Xiaomi dan Meizu juga mencoba menggaet konsumen dunia dengan mengeluarkan ponsel buatannya.

OPPO memasuki tanah air di tahun 2013. Beberapa produk permulaan yang dipasarkan di pasar domestik menghasilkan performa penjualan yang cukup signifikan. Merek telepon seluler asal China telah memasarkan 100 (seratus) ribu unit *smartphone* selama periode bulan april-oktober di tahun pertamanya. Nilai total penjualan setiap bulan berada pada kisaran 16 (enam belas) ribu ponsel. Perusahaan menyatakan hendak menanamkan modal di Indonesia dalam rangka investasi unit produksi. Dan pabrik perakitan milik OPPO Electronics telah beroperasi pada pertengahan tahun 2015.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan sebab-sebab yang mempengaruhi keputusan korporasi untuk menanamkan modal di Indonesia. Kerangka pemikiran dalam eksplanasi memakai perspektif institusional dalam *foreign direct investment (FDI)* dan teori internalisasi. Investasi asing langsung merupakan sebuah proses keuangan yang terkait dengan tindakan dan kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan pengalihan modal di luar negara asal atau *home country* (Cohen, 2007). Dunning menggambarkan motif dibalik fenomena *FDI* berkisar pada empat aspek yakni *market-seeking*, *resource-seeking*, *efficiency-seeking* dan *strategic-asset-seeking* (Franco, Rentocchini, & Vittucci-Marzetti, 2010). Salah satu alasan bagi perusahaan berinvestasi di luar negeri adalah kekuatan pasar yang dipunyai perusahaan (Teece, 1985) dan supaya mampu mengintervensi hambatan perdagangan berupa pemberian subsidi, insentif pajak, maupun pembatasan kuota yang diterapkan oleh pemerintah (Boddewyn, 2015). Cendekiawan sosial melihat bahwa organisasi harus menyesuaikan dengan lingkungannya untuk mendapatkan legitimasi. Sehingga perusahaan multinasional atau *multinational corporation (MNC)* bertindak *isomorphism* terhadap lingkungan sekitar. Meskipun tindakan yang diambil tidak dapat dibuktikan dapat meningkatkan efisiensi (Yuanfei & Fuming, 2012). Berdasarkan premis-premis tersebut, penulis berusaha memadukan kedua pendekatan yang tidak bertentangan.

Pembahasan

Kemunduran ekonomi global yang berporos di Eropa dan Amerika Serikat menambah permintaan impor dari wilayah lain. Pemenuhan kebutuhan yang tinggi tidak dapat diindahkan. Pemain-pemain baru yang muncul menawarkan alternatif produk bagi

konsumen telepon seluler di Indonesia. Akibatnya nilai impor alat-alat telekomunikasi dari China meningkat drastis. Hal ini dibarengi dengan kemerosotan nilai impor barang sejenis dari Barat.

Badan Pusat Statistik mencatatkan pertumbuhan impor alat telekomunikasi dari berbagai negara. Di tahun 2006, nilai ekspor asing telekomunikasi ke Indonesia sebanyak 1.33 milyar dollar. Dua tahun berselang nilai tersebut meningkat lebih dari dua ratus persen ke angka 6.77 milyar dollar amerika. Sementara data yang diutarakan oleh asosiasi importir China menunjukkan bahwa pada kuartal I/2010, *handphone* yang didatangkan ke Indonesia yaitu 9.6 juta unit. Jumlah ini melonjak 52.4% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Disamping itu ponsel yang berasal dari RRC mendominasi total impor telepon genggam sebesar 80% dari 12 juta buah dari berbagai negara (SWA, 2012). Keseluruhan barang diatas mewakili berbagai merek ponsel di Indonesia mencakup merek “lokal” ataupun asli dari negeri panda.



Setiap barang yang memasuki wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu. Prasyarat mengenai barang impor dan importir yang melakukan kegiatan impor diatur oleh menteri perdagangan. Regulasi barang impor secara umum mengacu pada permendag nomer 54 tahun 2009 dan diperbarui dengan permendag no 48 tahun 2015 yang berlaku secara efektif mulai awal tahun 2016. Ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam kebijakan itu meliputi:

1. Barang yang diimpor harus dalam kondisi baru. Tetapi menteri dapat mengajukan pengecualian terhadap aturan ini.
2. Barang dikategorikan dalam tiga jenis yaitu:

- a. Barang bebas impor
 - b. Barang dibatasi impor, dan
 - c. Barang dilarang impor
3. Barang dibatasi impor wajib melewati mekanisme perizinan sebagai berikut:
 - a. Pengakuan sebagai importir produsen
 - b. Pengakuan sebagai importir terdaftar
 - c. Persetujuan impor
 - d. Laporan surveyor
 4. Impor barang hanya bisa dilakukan oleh produsen yang memiliki Angka Pengenal Importir (API)
 5. Perizinan impor harus dimiliki oleh importir sebelum barang masuk ke pabean²

Kelima syarat utama di atas perlu dipenuhi agar barang dapat masuk ke dalam negeri secara legal. Jika terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku, pemerintah dapat membekukan API importir bersangkutan atau menjatuhkan sanksi lain sebagaimana diatur peraturan. Sementara barang yang telah masuk pabean harus diekspor kembali oleh importir³.

Situasi Makroekonomi dan Ketenagakerjaan

Kondisi makroekonomi menggambarkan perekonomian sebuah negara. Kekuatan dan kelemahan pasar menjadi pertimbangan bagi pemilik modal asing untuk berinvestasi atau mengambil keputusan lain terkait bisnis yang dijalankan. Indikator-indikator ekonomi secara makro meliputi nilai tukar mata uang, neraca perdagangan internasional, inflasi dan pengangguran. Ketersediaan tenaga kerja dan persaingan usaha juga mempengaruhi investor dalam menilai prospek di masa mendatang.

Indonesia mempunyai keunggulan dalam bidang jumlah penduduk dan angkatan kerja. Posisi Indonesia berada di urutan ke-empat berdasarkan total populasi di dunia. Laporan dari situs prb.org (2014) mencatatkan keseluruhan rakyat Indonesia sebesar 251 juta jiwa di tahun 2014 dan memproyeksikan penambahan lebih dari 100 juta pada tahun 2050 mendatang. Sementara data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa

² Permendag No. 48 Tahun 2015

³ Permendag No. 48 Tahun 2015 Pasal 7

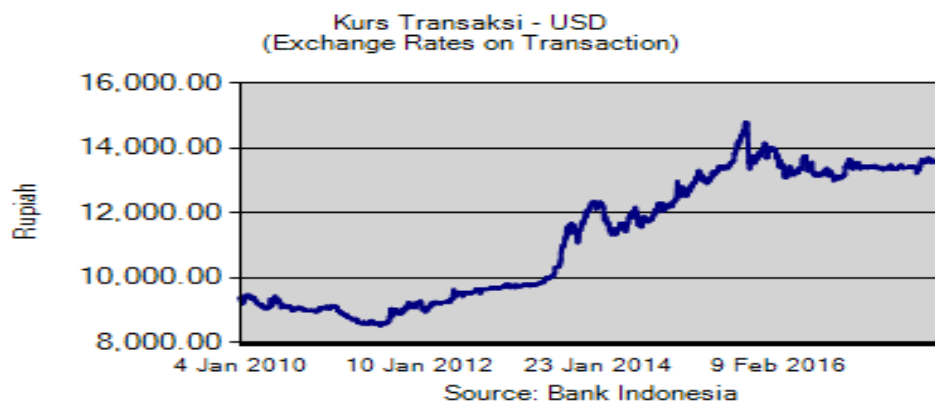
14.5 juta orang mendiami wilayah pulau Jawa di tahun 2015. Populasi yang besar ini tidak diimbangi dengan pemerataan lapangan pekerjaan yang ada. Karena sebab tersebut timbul kondisi masyarakat tidak memiliki mata pencarian yang banyak. Total pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2014 mencapai 7.2 juta orang. Mayoritas jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh mereka berada di rentang lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat atas umum atau kejuruan (SMA-K). Akan tetapi alumni perguruan tinggi sejajar diploma dan universitas lebih dari setengah juta. Sebuah ironi yang menguntungkan pemilik modal sebab korporasi bisa menempatkan mereka di posisi buruh hingga manajerial untuk pencari kerja berpendidikan sarjana dan paskasarjana.

Situasi ketenagakerjaan di tanah air juga disokong gaji buruh yang terbilang rendah. *International Labour Organization* (ILO, 2015) menempatkan upah pekerja Indonesia dalam urutan terendah diantara negara-negara ASEAN. Rata-rata pekerja memperoleh 174 dolar Amerika untuk bekerja selama satu bulan. Penghasilan itu berada dibawah Vietnam (US\$ 181), Filipina (US\$ 206), Thailand (US\$ 357), Malaysia (US\$ 609) dan Singapura (US\$ 3,547). Skema pengupahan buruh ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Misalnya pemerintah provinsi Banten menentukan upah minimum regional (UMR) sebesar 1.1 juta rupiah perbulan. Dengan begitu seorang buruh hanya menghasilkan 40 ribu rupiah dalam sehari. Perbedaan angka pengupahan yang lebih murah jika disandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara menyokong pertimbangan keuangan pengusaha dalam biaya produksi barang. Kelayakan hidup masyarakat pun membaik secara konsisten dalam rentang 2010-2015. Indeks pembangunan manusia (*human development index*) menghitung 3 indikator utama yaitu angka harapan hidup, rata-rata tingkat pendidikan dan pendapatan nasional perkapita. *HDI* di tahun 2013 sebesar 0.682 dan 0.686 di tahun 2014 (UNDP, 2016). Dengan pertumbuhan tersebut mengindikasikan kualitas pekerja yang membaik yang diharapkan menumbuhkan produktivitas kerja.

Situasi penanaman modal di tanah air disokong pula dengan perbaikan iklim usaha. Indeks kemudahan memulai usaha (*doing business index*) berada di kecenderungan positif. *Doing business index* memeringkatkan kondisi yang sedang sebuah negara untuk pembukaan

bisnis baru bagi pemilik modal domestik maupun asing. Beberapa konsep analisa yang digunakan untuk menghitung indeks kemudahan memulai usaha yaitu *starting a business, resolving insolvency, enforcing contract, trading across borders, paying tax, protecting minority investors, getting credit, registering property, getting electricity*, dan *dealing with construction permits*. Nilai *economic distance to frontier (DTF)* Indonesia sebesar 59.15 dari skala 100. Ranking global di urutan ke-114 dari 190 negara di tahun 2014 dan tepat setelah Palau dengan skor 59.5 (Doing Business, 2014). Meskipun mengalami perbaikan dalam kemudahan mengawali bisnis, indikator makroekonomi berupa kurs mata uang rupiah terhadap dollar amerika serikat mengalami tren penurunan.

Gejala penurunan rupiah telah terjadi semenjak akhir tahun 2013. Dalam rentang periode awal 2010 sampai akhir tahun 2013 pergerakan rupiah antara 8000-10000 per dollar amerika. Dan memasuki tahun 2014, dollar terapresiasi dan menembus batas *resistance* itu. Kenaikan nilai dollar amerika terus berlanjut hingga mencapai angka 14 ribuan rupiah. Fenomena depresiasi mata uang rupiah diduga berasal dari sentimen kebijakan yang diambil oleh bank sentral amerika serikat –*The Fed*- yang menaikkan suku bunga acuan. Kecenderungan penurunan rupiah juga diakibatkan oleh ketergantungan ekspor pada barang komoditas (Hastiadi, 2015) yang relatif berharga murah di pasar internasional. Fenomena perubahan kurs valuta asing dimungkinkan terjadi sebagai implikasi penggunaan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) semenjak 14 agustus 1997 (Warjiyo & Solikin, 2003) silam.



Brand Awareness dan Strategi OPPO Menghadapi Persaingan Pasar

Konsumen berperan sebagai penggerak utama keuangan perusahaan. Pendapatan dan laba secara mendasar dihasilkan dari konsumsi barang dan jasa yang diproduksi. Salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh pelanggan sebelum membelanjakan uang di saku mereka pada produk tertentu adalah *brand awareness*. Pengetahuan mengenai merek (*brand*) mempermudah calon pembeli dalam menentukan pilihan. Bahkan jika menghadapi pasar yang menjual jenis barang yang mirip atau sejenis (Macdonald & Sharp, 2000). Karena itu kekuatan merek dagang tidak bisa dianggap remeh oleh korporasi yang merupakan entitas bisnis. Terlebih pasar ponsel pintar dalam negeri termasuk kategori heterogen yang mempunyai banyak produsen seperti Samsung, LG, Nokia, Xiaomi, Advan, dan masih banyak lagi.

Lembaga survei Nusaresearch (2014) pernah melakukan penelitian terhadap pasar *smartphone* tanah air. Rata-rata tingkat kesadaran konsumen (*brand awareness*) merek gawai *smartphone* di Indonesia sebesar 22.6 persen (*unaided awareness*) dan 31.2 persen (*aided awareness*). Dengan begitu perusahaan harus memiliki angka 53.8 persen agar mampu mengungguli kompetitor. Samsung memiliki nilai tertinggi dengan 97.2 persen. Sementara OPPO dan Lenovo dinobatkan sebagai merek pendatang baru (*newcomers*) yang mempunyai angka kesadaran konsumen terbesar yaitu 64.7 persen dan 63.5 persen. Nusaresearch juga mengalkulasikan tingkat kepopuleran merek (*popular brand index*). *PBI* memperhitungkan empat elemen berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh responden. Empat aspek yang dipakai yaitu *top of mind*, *brand expansion*, *last used* dan *future intention*. OPPO diposisikan di urutan ketujuh diantara merek lain (*PBI Value*=3.3). Peringkat perusahaan sedikit lebih baik daripada merek Apple (*PBI value*=3.0) sekalipun masih sangat kecil ketika disandingkan dengan Samsung (*PBI value*=51.8) di tempat teratas.

OPPO menawarkan *smartphone* murah tetapi berteknologi canggih untuk menarik minat pembeli. Produk pertama korporasi yang dijual di dalam negeri yaitu Find 5 membawa fitur yang hampir serupa dengan Samsung Galaxy 4. Kedua telepon pintar memiliki spesifikasi kapasitas RAM 2 GB (*Gigabyte*), memori internal 16GB dan kamera belakang beresolusi 13 MP (*Megapixel*) (Kontan, 2013). Perbedaan dapat ditemukan di segi kecepatan

pemrosesan prosesor yaitu 1.5 GHz (*Gigahertz*) pada Find 5 dan 1.6 GHz untuk Galaxy 4. Akan tetapi Find 5 dihargai 5.5 juta rupiah dan harga Galaxy 4 sekitar 7.5 juta rupiah (Anggraini, 2013). Untuk memudahkan distribusi barang dan pemasaran di pasar lokal OPPO bekerjasama dengan Erajaya, Trikonsel Oke dan Telesindo sebagai distributor resmi (Kontan, 2013). Kesepakatan ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi merek OPPO diperoleh konsumen.

Perubahan Institusional di Dalam Negeri

Pelaku usaha tidak dapat mengabaikan peranan situasi politik dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Negara adalah otoritas tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk memaksa pihak lain mengikuti aturan yang ditetapkan (Budiardjo, 2008). Studi mengenai negara dan kekuasaan menunjukkan keterkaitan aktor utama kajian hubungan internasional ini dengan aspek eksternal yang berada dalam suatu ruang lingkup sistem tertentu (Jackson & Sorensen, 2009). Keputusan yang diambil Nike yang memindahkan kegiatan produksi ke luar negeri di masa lalu merupakan salah satu contoh yang bisa digunakan untuk melihat hubungan saling mempengaruhi antara lembaga formal, kelompok kepentingan dan sektor bisnis. Langkah perusahaan *apparel* diawali atas tekanan yang diberikan pemerintah amerika serikat dan organisasi HAM internasional agar pemerintah Indonesia meningkatkan perhatian pada hak-hak pekerja di industri garmen. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan upah buruh tidak terampil (*unskilled labour*) di tahun 1996 sebagai imbas tuntutan-tuntutan ini (Harrison & Scorse, 2004). Pengambilan keputusan itu dianggap merugikan Nike sehingga mengambil tindakan pengalihan lokasi produksi.

Jenis institusi dalam garis besar terbagi atas dua macam yakni informal (konvensi, nilai moral, dan norma sosial) dan formal (konstitusi, regulasi, undang-undang dan hukum). Produk yang dihasilkan oleh organisasi pemerintahan (legislatif dan eksekutif) dan peradilan (yudikatif) termasuk dalam bentuk institusi formal. Sementara bentuk peraturan yang berasal dari internal masyarakat merupakan pelebagaan informal (Mantzavinos, North, & Syariq, 2003). Sebuah kelembagaan formal di suatu negara bersifat kompleks dan terdiri atas 3 (tiga) tipe yaitu institusi pembuatan kebijakan (*regulatory*), politik dan ekonomi. *Regulatory institution* memiliki kewenangan untuk mencangkan dan

mengimplementasikan standarisasi dan regulasi dalam kaitannya terhadap *code of conducts* organisasi di dalam dan luar negeri. Kategori pertama ini meliputi tatanan hukum dan peraturan seperti kebijakan tentang hak kepemilikan pribadi dan badan hukum perusahaan. *Political institution* merupakan kerangka tata kelola proses politik di negara tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengannya yaitu bagaimana proses politik berlangsung, pembagian kekuasaan, pelaku atau aktor dan hak-hak politiknya. Sedangkan *economic institution* menyoroti kajian peraturan moneter dan fiskal yang memberikan imbas pada kegiatan perekonomian dan investasi (Holmes Jr, Miller, Hitt, & Salmador, 2011). Ketiga macam pelebagaan formal diatas saling memberikan efek pada kegiatan investasi asing di wilayah tertentu. Meskipun berasal dari aspek yang berbeda, kedua institusi bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku dan tindakan organisasi atau kelompok.

Salah satu penyebab tingkat ekspor alat-alat telekomunikasi dari negara-negara asing yang tinggi adalah ketiadaan hambatan perdagangan. Importir bisa mendatangkan barang kapan saja selama memenuhi persyaratan yang berlaku seperti dokumen kepabeanan, membayar bea masuk, dan biaya lain yang berkaitan dengan bongkar muat. Permendag no. 41 tahun 2016 mengatur khusus terhadap impor perangkat telekomunikasi berupa telepon genggam dan komputer tablet. Permen ini memberikan ketentuan bagi importir untuk menyertakan surat kerjasama dengan minimal tiga distributor di dalam negeri bagi produk telepon genggam berteknologi 3G maupun 4G. Dan aturan spesifik bagi komponen-komponen ponsel 4G harus melampirkan bukti pendirian pabrik di Indonesia atau bekerjasama dengan pengusaha lokal dalam perakitan produknya (Kemendag, 2016).

Syarat Impor Telepon Seluler, <i>Handheld</i>, dan Komputer Tablet		
Permendag No. 82 Tahun 2012	Permendag No. 41 Tahun 2016	
Fotokopi SIUP	Gawai 3G	API Umum atau Produsen
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan		Surat penetapan sebagai perusahaan IT
Fotokopi NPWP		Surat kerjasama minimal 3 (tiga) distributor
Fotokopi API		Rekomendasi dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

		Kemenperin ⁴
Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)	Gawai 4G	API Produsen
Fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Elektronika dan Komponennya		Surat penetapan sebagai perusahaan IT
Surat kerjasama minimal 3 (tiga) distributor		Surat kerjasama minimal 3 (tiga) distributor
Bukti pengalaman sebagai importir		Rekomendasi dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin
Bukti pengalaman sebagai distributor		

Kesimpulan

Investasi asing langsung OPPO di Indonesia dipengaruhi oleh:

1. Tingkat *brand awareness* dan *market share* perusahaan yang relative besar di pasar dalam negeri
2. Ketersediaan SDM yang mencukupi dengan kualitas yang memadai
3. Perbaikan iklim usaha, percepatan pembangunan dan kemudahan perizinan penanaman modal serta insentif yang diberikan pemerintah
4. Penetapan rancangan kebijakan pembatasan impor produk alat telekomunikasi
5. Tindakan *isomorphism* oleh OPPO untuk memperoleh legitimasi

DAFTAR PUSTAKA

Achmad. (2013, June 29). *Proyek Monorail Jakarta Rampung 2016*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/proyek-monorail-jakarta-rampung-2016.html>

⁴ Rekomendasi berisi keterangan mengenai a) bukti pembangunan industri di dalam negeri, atau b) bukti kerjasama dengan industri di dalam negeri sebagaimana diatur dalam permendag no. 41 tahun 2016 pasal 4.

- Ahmad, D. (2014, April 18). *A Brief History of Xiaomi*. Retrieved from GizChina:
<https://www.gizchina.com/2014/04/18/brief-history-xiaomi-chinas-tech-success-story/>
- Allawy, M. R. (2016, Maret 8). *Kumpulan Kejadian Penting dalam Sejarah Perkembangan Smartphone*. Retrieved from Tech in Asia Indonesia:
<http://id.techinasia.com/talk/kejadian-penting-perkembangan-smartphone>
- Anggraini, E. (2013, May 2). *Rilis di Indonesia, Samsung Galaxy S4 Lebih Murah dari iPhone 5*. Retrieved from Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/tekno/read/576642/rilis-di-indonesia-samsung-galaxy-s4-lebih-murah-dari-iphone-5>
- Armenia, R. (2015, January 26). *PTSP Diresmikan, 22 Kementerian Tak Punya Hak Keluarkan Izin*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150126122543-92-27369/ptsp-diresmikan-22-kementerian-tak-punya-hak-keluarkan-izin>
- AswicaHyono, H., & Christian, D. (2017, August). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. *Economics Working Paper 2*, 1-16. Retrieved from
https://www.csis.or.id/uploaded_file/publications/perjalanan_reformasi_ekonomi_indonesia_1997-2016.pdf
- Azam, M., & Lukman, L. (2010). Determinants of Foreign Direct Investment in India, Indonesia and Pakistan: A Quantitative Approach. *Journal of Managerial Sciences*, 4(1), 31-44.
- Bank Indonesia. (2017). *BI Rate*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/en/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2018). *Informasi Kurs*. Retrieved from Bank Indonesia:
<https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>
- BKPM. (2017, December 11). *JDIH BKPM RI*. Retrieved from Salinan Peraturan BKPM RI:
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/2017._13_PERBKPM_Perizinan_dan_Fasilitas_PM_.pdf

- BKPM. (2017). *Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan LPKM Menurut Sektor Q2 2017*. Retrieved from Badan Koordinasi Penanaman Modal:
http://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Perkembangan_Realisasi_Investasi_PMA_Menurut_Sektor_Q2_2017.xls
- BKPM. (2018). *Incentives*. Retrieved from BKPM:
<http://www.investindonesia.go.id/en/how-we-can-help/incentives>
- BKPM. (2018). *JDIH BKPM*. Retrieved from Salinan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018:
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Salinan_Peraturan_BKPM_6_Tahun_2018--.pdf
- BKPM. (2018). *JDIH BKPM RI*. Retrieved from PP No. 24 Tahun 2018:
https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PP_24_2018_OSS_dan_Lampiran_HVS.pdf
- Blomström, M., Kokko, A., & Mucchielli, J. L. (2003). The Economics of Foreign Direct Investment Incentives. In H. Herrmann, & R. E. Lipsey, *Foreign Direct Investment in the Real and Financial Sector of Industrial Countries* (pp. 37-60). Berlin: Springer.
- Boddewyn, J. J. (2015). Political Aspects of MNE Theory. In J. Cantwell, *The Eclectic Paradigm* (pp. 85-110). New York: Palgrave Macmillan.
- BPS. (2014, February 18). *Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi--2010---2035.html>
- BPS. (2017, December 15). *Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986-2017*. Retrieved from Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2017.html>
- Brewer, T. L. (1993). Government Policies, Market Imperfections, and Foreign Direct Investment. *Journal of International Business Studies*, Vol. 24, No. 1, 101-120.
- Buckley, P. J. (1988, Summer). The Limits of Explanation: Testing the Internalization Theory of the Multinational Enterprise. *Journal of International Business Studies*, Vol. 19, No. 2, 181-193.

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Büthe, T., & Milner, H. V. (2008). The Politics of Foreign Direct Investment into Developing Countries: Increasing FDI Through International Trade Agreement? *American Journal of Political Science*, 52(4), 741-762.
- Cohen, S. D. (2007). *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment*. New York: Oxford University Press.
- Deny, S. (2015, June 16). *Ini Alasan Samsung Bangun Pabrik Ponsel di Indonesia*. Retrieved from liputan6.com: <http://bisnis.liputan6.com/read/2253030/ini-alasan-samsung-bangun-pabrik-ponsel-di-indonesia>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983, April). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in. *American Sociological Review*, Vol. 48, No. 2, 147-160.
- Doing Business. (2013). *Doing Business 2014*. Washington: The World Bank.
- Doing Business. (2014). *Doing Business 2015*. Washington: The World Bank.
- Dunning, J. H. (2000). The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. *International Business Review*, 9(2), 163-190.
- Dunning, J. H., & Rugman, A. M. (1985, May). The Influence of Hymer's Dissertation on the Theory of Foreign Direct Investment. *The American Economic Review*, Vol. 75, No. 2, 228-232.
- Ehito, K. (2017, December 7). *Populist Politics in Indonesia*. Retrieved from Asia Pacific Bulletin Number 407: <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/50826/1/apb%20no.407.pdf>
- Forsgren, M. (2008). *Theories of the Multinational Firm*. Cheltenham: Edward Edgar Publishing Limited.
- Francis, J., CongCong, Z., & Mukherji, A. (2009). An Institutional Perspective on Foreign Direct Investment. *Management International Review*, Vol. 49, No. 5, 565-583.
- Franco, C., Rentocchini, F., & Vittucci-Marzetti, G. (2010). Why Do Firms Invest Abroad? An Analysis of the Motives Underlying Foreign Direct Investment. *The IUP Journal of International Business Law*, 9(2), 42-65.

- Gareta, S. P. (2014, December 16). *Menperin Serahkan Kewenangan Perizinan Bidang Industri ke BKPM*. Retrieved from Antaranews.com:
<https://www.antaranews.com/berita/469478/menperin-serahkan-kewenangan-perizinan-bidang-industri-ke-bkpm>
- German Chamber of Commerce in China. (2015, September 18). *Labor Market and Salary Report 2015/2016*. Retrieved from AHK:
http://china.ahk.de/fileadmin/ahk_china/Marktinfo/2015_16_Labor_Market_and_Salary_Report_limited_report.pdf
- German, K. (2011, August 2). *A Brief History of Android Phones*. Retrieved from CNET:
<https://www.cnet.com/news/a-brief-history-of-android-phones/>
- Goeltom, M. S., & Zulverdi, D. (1998). Manajemen Nilai Tukar di Indonesia dan Permasalahannya. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 69-87.
- Harrison, A., & Scorse, J. (2004, March). *The Nike Effect: Anti-Sweatshop Activist and Labor Market Outcomes in Indonesia*. Retrieved from ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Ann_Harrison/publication/267377816_The_Nike_Effect_Anti-Sweatshop_Activists_and_Labor_Market_Outcomes_in_Indonesia/links/55ccc63f08aeca56cc1c3e8.pdf
- Hayes, A. (2018). *Economics Basics: Supply and Demand*. Retrieved from Investopedia:
<https://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp>
- Hidayat, W. (2014, October 30). *OPPO Siap Bangun Pabrik di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com:
<https://tekno.kompas.com/read/2014/10/30/09190057/Oppo.Siap.Bangun.Pabrik.di.Indonesia>
- Holmes Jr, R. M., Miller, T., Hitt, M. A., & Salmador, M. P. (2011). The Interrelationship Among Informal Institutions, Formal Institutions and Inward Foreign Direct Investment. *Journal of Management*, 39(2), 531-566.
- ILO. (2014). *Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014*. Retrieved from International Labour Organization: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_329870.pdf

- ILO. (2015). *Labor and Social Trends in Indonesia 2014-2015*. Geneva: ILO Publications.
- Jackson, R., & Sorensen, G. &. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (D. Suryadipura, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendag. (2016, Juny 6). *Permendag no. 41 tahun 2016*. Retrieved from JDIH Kemendag: <http://jdih.kemendag.go.id/backen dx/image/old/2016/05/30/perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-82m-dagper122012-tentang-ketentuan-impor-telepon-seluler-komputer-genggam-handheld-id-1467390553.pdf>
- Kemenkeu. (2018). *Data APBN*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kemenkominfo. (2009). *Permen Kominfo No. 7 tahun 2009*. Jakarta: Kemenkominfo Ri.
- Kemenkominfo. (2015, July 8). *Permen Kominfo no. 27 tahun 2015*. Retrieved from JDIH kominfo: https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/inventaris/id/2015/kategori/7
- Kemenperin. (2016, July 27). *Permen Menperin no.65 tahun 2016*. Retrieved from JDIH Kemenperin: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBn9O_nvXaAhVIIWMKHfEgAy0QFgg_MAE&url=http%3A%2F%2Fjdih.kemenperin.go.id%2Fsite%2Fdownload_peraturan%2F2244&usg=AOvVaw0xs2N0bxruOwmhiYYKdC2C
- Kementerian BUMN. (2017, Januari 3). *Statistik Jumlah BUMN*. Retrieved from Kementerian BUMN: <http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN>
- Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (2000). Globalization: What's New? What's Not? (And So What?). *Foreign Policy*, 104-119.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence: Fourth Edition*. Glenview: Pearson Education Inc.
- Kontan. (2013, April 18). *Ini Strategi OPPO Rebut Pasar Ponsel di Indonesia*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/ini-strategi-oppo-rebut-pasar-ponsel-di-indonesia>

- Kontan. (2013, October 17). *Oppo Bidik Pasar Ponsel Premium*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/oppo-bidik-pasar-ponsel-premium>
- Krajci, I., & Cummings, D. (2013). *Android on X86*. Berkeley: Apress.
- Kurniawan, D. (2012). Domestic Resources Policies: Dukungan Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pembentukan Modal. *Gema Eksos*, 8(1), 16-33. Retrieved from <http://www.e-jurnal.unisfat.ac.id/ojs/index.php/EKOSOS/article/download/33/39>
- Lin, C., & Fuming, J. (2012). State Ownership Effect on Firm's FDI Ownership Decisions under Institutional Pressure: A Study of Chinese Outward Investing Firms. *Journal of International Business Studies*, 43(3), 264-284.
- Lukman, E. (2013, October 17). *Setelah Menjual 100.000 Handphone di Indonesia, OPPO Meluncurkan N1*. Retrieved from Tech in Asia: <https://id.techinasia.com/jual-100000-handphone-oppo-luncurkan-n1>
- Macdonald, E. K., & Sharp, B. M. (2000). Brand Awareness Effects on Consumer Decision Making for a Common, Repeat Purchase Product:: A Replication. *Journal of Business Research*, 48(1), 5-15.
- Madu, L. (2014, Desember). Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019. *Transnasional*, 9(2), 104-117.
- Mailanto, A. (2015, February 12). *Polytron Kenalkan Smartphone 4G-LTE Penuhi TKDN 35%*. Retrieved from SINDOnews: <https://autotekno.sindonews.com/read/963604/122/polytron-kenalkan-smartphone-4g-lte-penuhi-tkdn-35-1423730150>
- Mantzavinos, C., North, D. C., & Syariq, S. (2003). Working Paper: Learning, Institutions and Economic Performance. *Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods*(13), 1-19. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/85106/1/2003-13_online.pdf
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008, April). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- May, C. (1996). Strange Fruit: Susan Strange's Theory of Structural Power in the International Political Economy. *Global Society: Journal of Interdisciplinary International Relations*, 10(2), 167-189.

- Morrissey, O., & Udomkerdmongkol, M. (2012). Governance, Private Investment and Foreign Direct Investment in Developing Countries. *World Development*, 40(3), 437-445.
- Mulyono, F. (2011). Materialisme: Penyebab dan Konsekuensi. *Bina Ekonomi*, 15(2), 44-58.
- Nayak, D., & Choudhury, R. N. (2014, March). A Selective Review of Foreign Direct Investment Theories. *ARTNeT Working Paper Series No. 143*, 1-34.
- Nusaresearch. (2014, November). *Indonesia's Smartphone Market 2014*. Retrieved from W&S Indonesia:
http://nusaresearch.com/upload/userfiles/files/TOPLINE%20FINDING_Smartphone_ENG.pdf
- OPPO. (2017). *About OPPO*. Retrieved from OPPO: <http://www.oppo.com/en/about-us>
- Otsuka, M., Thomsen, S., & Goldstein, A. (2011, February). Improving Indonesia's Investment Climate. *Investment Insights*(1), pp. 1-8.
- Pamugar, H. (2017, Jan-Jun). Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) unruk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Negara*, 3(1), 49-67.
- Pemerintah RI. (2014). *UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pitelis, C. (2007). Esith Penrose and a Learning-Based Perspective on the MNE and OLI. *Management International Review*, Vol. 47, No. 2, 207-219.
- PRB. (2014). *2014 World Population Data Sheet*. Retrieved from Population Reference Bureau: https://assets.prb.org/pdf14/2014-world-population-data-sheet_eng.pdf
- Rosyidin, M. (2014). *Researchgate*. Retrieved from Kembali Ke Masa Depan? membaca Arah Politik Luar Negeri Jokowi dan Prospek Indonesia Menjadi Pemain Global: https://www.researchgate.net/profile/Mohamad_Rosyidin/publication/316076081_Kembali_ke_Masa_Depan_Membaca_Arah_Politik_Luar_Negeri_Jokowi_dan_Prospek_Indonesia_Menjadi_Pemain_Global/links/58ef1bfaaca2724f0a28cd38/Kembali-ke-Masa-Depan-Membaca-Arah-Politik
- Rugman, A. M. (2006). *Inside the Multinationals, 25th Anniversary Edition*. New York: Palgrave Macmillan.

- Rugman, A. M. (2010). Reconciling Internalization Theory and Eclectic Paradigm. *Multinational Business Review*, 18(2), 1-12.
- Sari, E. V. (2014, December 15). *Resmi, Tak Ada Lagi Tatap Muka di BKPM*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141215113738-92-18175/resmi-tak-ada-lagi-layanan-tatap-muka-di-bkpm>
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and Organizations: 4th Edition*. California: Sage.
- Stange, S. (1995). The Defective State. *Daedalus*, 55-74.
- Statista. (2018). *Mobile Phone Vendor's Market Share in Sold Units to End Users Worldwide from 1997 to 2014*. Retrieved from Statista: <https://www.statista.com/statistics/271574/global-market-share-held-by-mobile-phone-manufacturers-since-2009/>
- Strange, S. (Spring, 1995). The Defective State. *Daedalus*, Vol. 124, No. 2, 55-74.
- Sugianto, D. (2014, December 2). *Izin Investasi di BKPM, Kementerian Hanya Uji Teknis Saja*. Retrieved from Okezone.com: <https://economy.okezone.com/read/2014/12/02/20/1073707/izin-investasi-di-bkpm-kementerian-hanya-uji-teknis-saja>
- SWA. (2012, May 15). *Jurus Ponsel Cina Hadapi Serangan Balik Pemain Besar*. Retrieved from SWA Online Magazine: <https://swa.co.id/swa/headline/jurus-ponsel-cina-hadapi-serangan-balik-pemain-besar>
- Teece, D. J. (1985, May). Multinational Enterprise, Internal Governance, and Industrial Organization. *The American Economic Review*, Vol. 75, No. 2, 233-238.
- Trivedi, M. (July, 1998). Distribution Channels: An Extensive of Exclusive Retailership. *Management Science*, Vol. 44, No. 7, 896-909.
- UNCTAD. (2017). *World Investment Report 2017*. Geneva: United Nations Publication.
- Utami, L. S. (2018, Januari-Juni). Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia Menghadapi Krisis Keuangan Global Tahun 2010-2016. *JOM FISIP*, 5(1), 1-13. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/viewFile/18882/18253>
- Verbeke, A. (2003, November). The Evolutionary View of the MNE and the Future of Internalization Theory. *Journal of International Business Studies*, Vol. 34, No. 6, 498-504.

- Wardani, A. S. (2017, February 10). *Pabrik Xiaomi di Batam Siap Produksi Ratusan Ribu Smartphone*. Retrieved from Liputan6.com:
<http://teknoliputan6.com/read/2852691/pabrik-xiaomi-di-batam-siap-produksi-ratusan-ribu-smartphone-4g>
- Warjiyo, P., & Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Warjiyo, P., & Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- World Bank. (2013). *Doing Business 2014: Indonesia*. Washington: World Bank Group.
- World Bank. (2013). *Doing Business 2014: Indonesia*. Washington: The World Bank.
- World Bank. (2016). *Doing Business 2016: Indonesia*. Washington: The World Bank.
- Wuryandani, D. (2015, Juni). Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97-108.
- Yiu, D., & Shige, M. (2002, November-December). The Choice between Joint Venture and Wholly Owned Subsidiary: an Institutional Perspective. *Organization Science*, Vol. 13, No. 6, 667-683.
- Yuanfei, K., & Fuming, J. (2012). FDI Location Choice of Chinese Multinationals in East and Southeast Asia: Traditional Economics Factors and Institutional Perspective. *Journal of World Business*, 47(1), 45-53.
- Zukin, S., & DiMaggio, P. (2012). Structures of Capital: the Social Organization of the Economy. In K. Yuanfei, & J. Fuming, *FDI Location Choice of Chinese Multinationals in East and Southeast Asia: Traditional Economic Factors and Institutional Perspective* (pp. 45-53). Retrieved from
http://www.rcmewhu.com/upload/file/20150527/20150527205652_4935.pdf